BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar sumber pendapatannya berasal dari pajak. Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan (Rukmini, 2016)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi bagi penerimaan daerah terbesar di ibukota negara indonesia adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Saat ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan kendaraan bermotor di indonesia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum dalam melaksanakan kegiatan sehari harinya dan tidak sedikit pula yang memiliki kendaraan lebih dari satu untuk memenuhi tuntutan kebutuhannya. Hal ini disebabkan banyaknya kemudahan yang datang kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor, seperti pembelian kendaraan bermotor dengan sistem kredit yang ditawarkan oleh *dealer*, persyaratan dokumen dokumen yang tidak menyulitkan masyarakat misalnya

dengan menunjukkan identitas diri, dan pembayaran uang muka (*down payment*) yang sudah bisa langsung membeli kendaraan bermotor

Oleh karena itu penerimaan pajak daerah untuk pajak kendaraan bermotor meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Berdasarkan data dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, penerimaan pajak daerah untuk Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 disektor pajak kendaraan bermotor menyumbang kontribusi yang cukup besar yaitu 25% dari total penerimaan daerah sebanyak Rp 32.067.97.312.780. Berikut merupakan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 – 2017

Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2015 - 2017

Tahun	APBD	Realisasi	Pencapaian (%)
2015	Rp 6.050.000.000.000	Rp 6.090.200.500.774	100.66%
2016	Rp 7.050.000.000.000	Rp 7.143.530.355.999	101.33%
2017	Rp 7.900.000.000.000	Rp 7.750.000.000.000	98%

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah, 2019

Berdasarkan tabel 1. data realisasi penerimaan pajak daerah untuk provinsi DKI Jakarta selama tahun 2015 - 2017, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan pajak daerah dari yang semestinya ditargetkan dimana hanya mencapai 98%. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya penerimaan pajak daerah untuk tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan dan mampu mencapai bahkan melebihi target Anggaran Pajak Belanja Daerah. Namun sangat disayangkan penerimaan pajak daerah khusus untuk pajak kendaraan bermotor masih jauh dari yang diharapkan padahal jumlah kendaraan bermotor selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya wajib pajak yang menunggak pembayarannya. Pada bulan april 2018 silam pihak Polda Metro Jaya bersama Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Jasa Raharja menggelar razia pengesahan STNK di sejumlah tempat di wilayah DKI Jakarta diantaranya Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Hasil razia menunjukkan bahwa terdapat jutaan kendaraan yang terdiri dari 3,2 juta kendaraan roda dua dan 450 ribu roda empat pada tahun 2017 belum

membayar pajak tahunan dengan potensi pajak senilai Rp 1,6 Triliyun yang diungkapkan oleh Edi Sumantri selaku Ketua Badan Pajak Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu wilayah yang termasuk kedalam daftar daerah dengan hutang pajak kendaraan terbesar di DKI Jakarta adalah Jakarta Selatan. Kepala Unit Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Jakarta Selatan, Khairil Anwar, menyatakan bahwa sebanyak 20% kendaraan di Jakarta Selatan atau sekitar 900.000 kendaraan belum membayar pajak. Oleh karena itu, SAMSAT Jakarta Selatan bersama Polri, Dishub, Jasa Raharja, dan Bank DKI menggelar razia pengesahan STNK dan razia gabungan guna menjaring pengemudi yang belum membayar pajak kendaraannya. Selain itu bagi kendaraan yang tidak membawa STNK yang sah dilakukan tindakan penilangan karena dikategorikan menunggak pajak dan dianggap melanggar aturan dalam berkendara. Razia ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pemilik kendaraan agar taat membayar pajaknya. Dalam razia ini ditemukan sebanyak 41 kendaraan menunggak pajak yang terdiri dari 22 kendaraan yang masuk kategori telat bulanan dan 19 kendaraan yang masa pembayaran pajaknya sudah terlambat lebih dari satu tahun. Budianto, selaku Kasubag Tata Usaha Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) SAMSAT Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa dari 41 kendaraan bermotor yang dilakukan penindakan memiliki potensi pajak sebesar Rp 120.728.700 yang belum termasuk denda. Berikut merupakan data terkait rata rata pembayaran pajak per-tahun kendaraan bermotor dikota jakarta selatan:

Tabel 2. Data Penerbitan STNK Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Selatan Tahun 2015 - 2017

Tahun	Jenis Kendaraan Bermotor				Jumlah
	Roda Dua/ Tiga	Roda Empat/ Lebih			
		Mobil Penumpang	Mobil Beban	Bus	
2015	267.392	151.763	16.648	967	436.770
2016	258.056	156.070	15.340	591	430.057
2017	243.476	159.048	15.838	776	419.138

Sumber : Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Selatan, 2019

Berdasarkan tabel 2. data penerbitan STNK Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Selatan tahun 2015 – 2017 tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor selama 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2015 berjumlah 436.770 wajib pajak, kemudian menurun sebesar 6.713 menjadi 430.057 wajib pajak pada tahun 2016. Pada tahun 2017 penurunan kembali terjadi sebesar 10.919 sehingga jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya hanya 419.138 wajib pajak. Melihat banyaknya wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajaknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk menghapus denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mulai tanggal 27 Juni sampai 31 Agustus 2018. Hal itu dilakukan Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Kebijakan penghapusan denda itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

Dari kasus tersebut yang menjadi permasalahan adalah terkait kepatuhan wajib pajak disektor pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang undang dan peraturan yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016). Minimnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi tentang sanksi perpajakan (Putra & Jati, 2017). Sedangkan menurut Putra & Merkusiwati (2018) faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Dalam meningkatkan kepatuhan pajak maka seorang wajib pajak memerlukan pengetahuan terkait perpajakan khususnya pengetahuan dasar seperti pendaftaran diri, pengisian formulir, pembayaran pajak terutang, dan pelaporan kewajiban perpajakannya (Putra & Jati, 2017). Tidak hanya itu pengetahuan tentang perpajakan juga meliputi pengetahuan tentang fungsi membayar pajak, sistem pemungutan pajak yang berlaku, dan manfaat dalam membayar pajak karenanya apabila seorang wajib pajak telah memiliki pengetahuan yang cukup

maka akan menumbuhkan perilaku patuh terhadap pajak. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari (2015), Kemala (2015), Ilhamsyah dkk (2016), dan Chusaeri dkk (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian Wardani & Rumiyatun (2017) dan Wardani & Asis (2017) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah berupaya untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan yang diikuti dengan perkembangan zaman khususnya di era digital. Pemerintah menciptakan suatu inovasi untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak yang disebut dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Kennedy, 2005) dalam (Astana & Merkusiwati, 2017). Salah satu cakupan dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem administrasi dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dimana telah diimplementasikan oleh pemerintah melalui berbagai inovasi yang berorientasi langsung kepada wajib pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disektor kendaraan bermotor seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Produk produk tersebut antara lain seperti Samsat Pembantu, Samsat Gerai/*Corner/Payment Point/Outlet*, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Samsat *Delivery Order/Door To Door*, *E-Samsat*, dan Pengembangan Samsat lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat. Hal tersebut dilakukan pemerintah guna mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh wajib pajak ketika melakukan pembayaran pajak motornya di Samsat yakni belum efektif dan efisien pelayanan di Samsat terkait sistem dan prosedur pembayaran pajak seperti wajib pajak yang harus berpindah dari satu loket ke loket yang lain, minimnya sarana dan prasarana yang tersedia di Samsat, sementara itu proses pengurusan pembayaran pajak yang terkesan lambat karena masih menggunakan cara yang

manual, serta antrian panjang yang cukup melelahkan bagi wajib pajak (Oknawati, 2016).

Menurut Slemrod & Kopczuk (2002) dalam Astana dan Meskuriwati (2017) menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara modernisasi sistem perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yakni modernisasi administrasi perpajakan akan berjalan dengan efektif apabila diikuti dengan perancangan dan pelaksanaan hukum pajak secara konsisten. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sarunan (2015), Prananti & Rasmini (2014), Putra & Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Damayanti & Amah (2017) yang mengungkapkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tidak hanya dari sisi administrasi perpajakan namun hukum terkait dengan pelanggaran perpajakan harus ditegakkan secara adil, tegas, dan konsisten yaitu dengan memberikan sanksi administratif atas wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Dengan diberlakukannya sanksi tersebut diharapkan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak serta memberikan pelajaran bagi wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Sari & Susanti, 2014). Beberapa peneliti telah menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang memberikan hasil yang berbeda beda diantaranya penelitian Wardani & Asis (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian penelitian yang dilakukan Susilawati & Budiarta (2013), Ilhamsyah dkk (2016), dan Paramartha & Rasmini (2016) yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam memenuhi kewajibannya terdapat beberapa wajib pajak yang belum memiliki pengetahuan dibidang pajak khususnya pengetahuan dasar terkait perpajakan seperti pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajaknya dengan baik diiringi dengan adanya peraturan perpajakan yang cukup sering

berubah yang menyebabkan wajib pajak kesulitan untuk mengikuti perkembangannya. Pemerintah bekerjasama dengan SAMSAT Jakarta Selatan telah berupaya untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dengan menyederhanakan prosedur dalam membayar pajak, seperti dibuatnya aplikasi *E-Samsat* yang memanfaatkan teknologi informasi yakni membayar pajak melalui *E-Banking* atau ATM, menyediakan *Samsat Drive Thru* dimana wajib pajak tidak perlu untuk turun dari motornya dalam membayar pajak, pengadaan *Samsat Keliling* yang tersedia diberbagai daerah di DKI Jakarta, dan *Samsat Corner* yakni *Samsat* yang tersedia di mall/ supermarket yang dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya dan tidak perlu berpindah dari satu loket ke loket yang lain. Hal tersebut dilakukan guna memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang secara langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dengan diberlakukannya penghapusan sanksi administratif karena banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotornya membuat masyarakat khususnya wajib pajak berbondong bondong untuk melunasi tunggakan pajaknya dimana berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di SAMSAT Jakarta Selatan)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

- a. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- b. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- c. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk membuktikan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- b. Untuk membuktikan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- c. Untuk membuktikan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

- a. Aspek Teoritis
 - 1) Mahasiswa Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana dalam menambah ilmu pengetahuan dibidang perpajakan khususnya tentang faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
 - 2) Penelitian selanjutnya, yakni sebagai bahan rujukan bagi pihak pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut serta mengkaji permasalahan yang sama dimasa mendatang
 - 3) Penulis, sebagai sarana untuk melatih kemampuan dan menambah wawasan dibidang akuntansi khususnya perpajakan
- b. Aspek Praktis
 - 1) Bagi Aparat Pajak, sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta informasi yang diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan aparat pajak khususnya dalam menangani masalah wajib pajak
 - 2) Bagi Masyarakat, sebagai sarana dalam menambah wawasan mengenai ilmu perpajakan di Indonesia, memahami pentingnya pajak untuk pembangunan daerah serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam rangka mendorong minat untuk membayar pajak